

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi gabungan kota IHK di Provinsi NTT pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,86% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,19% (yoy) dan inflasi Nasional sebesar 1,57% (yoy). Sejalan dengan penurunan tekanan inflasi, level inflasi Provinsi NTT berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$ . Tekanan inflasi terutama bersumber dari komoditas bawang merah, bawang putih, beras, cabai rawit dan daging ayam menjadi pendorong laju inflasi

Kota Waingapu mengalami inflasi sebesar 2,77% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,66% (yoy) lebih tinggi dari inflasi Provinsi NTT sebesar 1,86% (yoy) dan lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy). Sejalan dengan peningkatan tekanan inflasi, level Kabupaten Sumba Timur berada pada rentang sasaran nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$ . Tekanan inflasi bersumber dari kenaikan harga ayam hidup, minyak goreng, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, kangkung, sawi hijau, cabai rawit, bawang merah, kopi bubuk dan sigaret kretek mesin (SKM) menjadi faktor pendorong inflasi Kota Waingapu. Ayam hidup dan ikan-ikan menjadi komoditas pendorong inflasi utama karena konsumsi masyarakat Kota Waingapu yang tinggi, sedangkan produksinya rentan mengalami gejolak karena faktor cuaca. Komoditas lainnya yang menjadi pendorong inflasi juga mengalami kenaikan akibat keterbatasan produksi karena curah hujan yang tinggi yang ada cuman satu saja di triwulan I.

Di sisi lain, penurunan harga mie instan, ikan kakap merah, ikan tembang, daun kemangi, tomat, susu bubuk untuk balita, kayu balokan, angkutan udara, sabun mandi dan sirih menjadi faktor penahan inflasi Kota Waingapu. Harga ikan kakap merah dan ikan tembang, di Waingapu mengalami penurunan akibat tangkapan nelayan yang sedang banyak. Sementara itu, daun kemangi, tomat dan sirih juga mengalami penurunan harga akibat pasokan yang sedang banyak karena telah memasuki masa panen, mie instan, susu bubuk untuk balita,, angkutan udara, sabun mandi mengalami penurunan karena ada subsidi transportasi udara dan subsidi listrik.

Risiko ke depan yang mungkin di hadapi oleh Kabupaten Sumba Timur adalah risiko terhadap munculnya Lanina atau hujan berlebihan dan virus-virus pada ternak, yang akan mengganggu distribusi barang kebutuhan pokok dan mempengaruhi permintaan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya permintaan masyarakat, sehingga menyebabkan kondisi harga barang kebutuhan pokok akan terganggu.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan. Rendahnya konektivitas yang dimaksud adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh daerah-daerah Timor yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
2. Kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi atau asymmetric information antar pelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar.
3. Distorsi struktur pasar. Distorsi struktur pasar ditimbulkan akibat adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga

Produktivitas pangan. Kondisi iklim dan cuaca yang cenderung panas hampir di seluruh

4.

Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT menjadikan lahan bersifat kering dan tandus, sehingga sangat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktifitas pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kabupaten Sumba Timur terus berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan OPD terkait, stakeholders, maupun lembaga dan instansi vertikal lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah, Kabupaten Sumba Timur telah memiliki peta jalan (roadmap) sebagai arah kebijakan pengendalian inflasi. Termasuk guna menjaga stabilisasi inflasi di daerah, Kabupaten Sumba Timur telah memiliki program unggulan yang bekerjasama dengan seluruh instansi, lembaga dan stakeholders terkait lainnya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam program yang telah dituliskan dalam peta jalan pengendalian inflasi di daerah, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur secara rutin setiap bulannya melaksanakan kegiatan Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi TPID, serta melaksanakan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Kabupaten Sumba Timur setiap triwulannya serta melaksanakan tindak lanjut atas rapat HLM TPID yang telah dilakukan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Mendorong Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen (berupa tanaman bahan makanan/hortikultura) untuk mendukung ketersediaan stok pangan yang bernasis kebutuhan pasar dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan kebun Masyarakat sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi;
2. Mendorong Percepatan Hilirisasi Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan menjadi produk turunan seperti sambal-sambal, saus tomat, dendeng se'i, bakso, abon dan lain-lain untuk meningkatkan added value dan mewujudkan one village one product (OVOP);
3. Memfasilitasi dan Mendukung Pemanfaatan Penerapan Teknologi Pengolahan yang Tepat Guna sehingga proses produksi modern, efisiensi dan setiap peoduk memenuhi standar SEHAT;
4. Memastikan Pasar yang Menyerap produk-produk masyarakat dan atau menghubungkan produsen, off-taker dan konsumen untuk membeli setiap produk secara continue;
5. Memitigasi dampak perubahan iklim sehingga penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan dapat dihindari supaya tidak merugikan produsen;
6. Perlu mendorong generasi milenial dan generasi z secara sistematis agar mau menjadi petani, peternak dan nelayan modern;
7. Pemanfaatan Dana Desa yang Tepat Sasaran, untuk mendukung Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat yang ada di 156 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur dengan mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes;
8. BULOG Waingapu agar terus melaksanakan penyerapan beras lokal yang diproduksi oleh Petani Sumba Timur dengan harga yang memadai;

Meningkatkan Akses Keuangan Daerah bagi pelaku usaha sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui Program Kredit Merdeka oleh Bank NTT, dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

10. Implementasi digitalisasi PKB dan memberikan insentif sebagai sweetener bagi wajib pajak yang menyetor melalui kanal digital;
11. Mendorong Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Produksi
12. Mendorong pemberian Subsidi Transportasi melalui APBD dalam rangka ketersediaan stok, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
13. Mendorong penggunaan Dana BTT (Bantuan Tidak Terduga) sesuai kebutuhan apabila kondisi inflasi sudah diluar rentang sasaran  $2,5 \pm 1\%$ ;
14. Mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) Business to Business dan Government to Government dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari daerah Surplus ke daerah Defisit;
15. Bulog Kabupaten Sumba Timur agar terus melaksanakan Penyerapan Beras Lokal yang diproduksi oleh petani di Kabupaten Sumba Timur dengan harga yang memadai;
16. Meningkatkan Akses Penyaluran Beras SPHP yang dikelola Bulog, dengan memperbanyak Agen, Pengecer dan Kios Pangan;
17. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan Kerja Kolaboratif Seluruh anggota TPID dan stakeholder terkait, sehingga terjalin komunikasi yang efektif;
18. Mendorong Peran KADIN Kabupaten Sumba Timur sebagai mitra pelaku usaha dalam hal produksi dan pemasaran hasil panen;
19. Menodorong cetak lahan kering yang didukung ketersediaan embung untuk kebutuhan peningkatan produksi pangan.